

IDENTIFIKASI DESA TULUNGREJO SEBAGAI DESA MANDIRI

Indah Permatasari , Putri Aprillia , dan Gabriel Riskyanus.

Perencanaan Wilayah dan Kota , Institut Teknologi Nasional Malang (ITN)
2124050@scholar.itn.id

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Penyusunan perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mandiri memerlukan langkah-langkah strategis, yang terencana, terarah, dan terukur, sehingga memudahkan bagi kita untuk mencermati kemajuan-kemajuannya. Secara umum, strategi dalam mewujudkan desa mandiri adalah diawali dengan terbitnya UU Desa, yang memiliki paradigma baru dengan konsep desa membangun. Konsep desa membangun berarti bahwa kekuatan untuk membangun desa bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat desa harus berpartisipasi secara aktif dalam membangun desa itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya-upaya persuasif yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif penting dilakukan, yaitu dengan mendorong masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Pembangunan ini dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Selain melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan desa mandiri juga melibatkan sumberdaya/potensi unggulan dari desa tersebut. Produk unggulan desa adalah komoditas yang ada di desa dan diupayakan secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemangku kepentingan desa atas produk-produk yang dimiliki atau dikuasai serta telah ditentukan dan disepakati bersama berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, untuk dikembangkan melalui keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya.

Kata Kunci - *Identifikasi , Desa Tulungrejo , Desa Mandiri*

ABSTRACT

In Law Number 6 of 2014 concerning Villages article 78 paragraph (1) Village development aims to improve the welfare of village communities and the quality of human life as well as overcoming poverty through fulfilling basic needs, building village facilities and infrastructure, developing local economic potential, and utilizing resources, nature and the environment in a sustainable manner. Village development essentially prioritizes togetherness, kinship and mutual cooperation in order to realize peace and social justice. The preparation of village development planning refers to Regency/City development planning. The Village Development plan document is the only planning document in the Village and is the basis for preparing the Village Revenue and Expenditure Budget. Village Development Planning is carried out by involving the Village community through the Village Development Planning Conference. Village development is carried out by the Village Government and village communities in a spirit of mutual cooperation and utilizing local wisdom and natural village resources. In accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village Development includes planning, implementation and supervision stages. Independent village development requires strategic steps, which are planned, directed and measurable, making it easier for us to monitor progress. In general, the strategy for realizing independent villages is to start with the issuance of the Village Law, which has a new paradigm with the concept of developing villages. The concept of building a village means that the power to develop a village comes from the strength possessed by the community itself. Village communities must participate actively in developing the village itself. For this reason, persuasive efforts are needed using a participatory approach. It is important to take a participatory approach, namely by encouraging village communities to be actively involved in formulating village development policies. This development was carried out as an effort to accelerate and improve the quality of

services, development and empowerment of village communities by prioritizing togetherness, kinship and mutual cooperation. Apart from actively involving the community, independent village development also involves the superior resources/potential of the village. Village superior products are commodities that exist in the village and are sought in a systematic and planned manner by village stakeholders for products that are owned or controlled and have been determined and mutually agreed upon based on certain criteria, to be developed through linkages with supporting element.

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan suatu cara pikir dalam memahami persoalan-persoalan tentang sosial dan ekonomi, yang paling utama adalah tentang masa depan dan berkembang dengan hubungan diantara tujuan serta keputusan yang diambil secara kolektif dan dalam mengusahakan suatu kebijakan dan program. Didalam perencanaan di harapkan apa yang di inginkan dapat terjadi dan terwujud di kemudian hari sesuai dengan apa yang di pikirkan.

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di capai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya (Alder 1999 dalam Rustiadi 2008 :339). Perencanaan juga bagian dari daur kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pengambilan keputusan baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk masa depan yang di lakukan secara terus menerus dengan melihat dan mengidentifikasi keadaan yang terjadi pada masa lalu dan saat ini. Sehingga, dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan hak tradisional yang di akui desa berasal dari bahasa sanseketa, secara etimologi desa yang berarti tanah air atau tanah kelahiran, menurut kamus besar indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri.

Secara geografis, Desa wisata Tulungrejo terletak pada 07°47'141" 1 S dan 112°32'787" BT. Desa wisata Tulungrejo merupakan salah satu desa yang terdapat dalam Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan ketinggian tempat 1.150 meter dpl dan dengan suhu rata-rata 15-25°C. Secara administratif mempunyai luas 807,019 Ha dan memiliki 5 dusun, Desa Tulungrejo merupakan salah satu desa yang di tunjuk pemerintah Kota Batu sebagai desa percontohan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, khususnya pertanian. Dalam pelaksanaannya, kelompok pengembangan yang bernama TFE Tulungrejo

Fundacation Experience dan bekerjasama dengan masyarakat desa. Penggunaan lahan di Desa Tulungrejo sebagian besar di aktivitas pertanian yakni sebesar 74,26%, diantaranya 4,99% lahan digunakan untuk persawahan 69,27% perladangan. Dari sejumlah lahan perladangan, budidaya apel dan sayur paling mendominasi lahan petani. Sedangkan luasan lahan yang digunakan untuk permukiman sebesar 12,67% dan penggunaan lainnya sebesar 13,07%. Adapun batas Desa Tulungrejo sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Sumberbrantas
Sebelah Timur	: Desa Punten
Sebelah Barat	: Hutan perum perhutani BKPH Pujon
Sebelah Selatan	: Desa Sumbergodo

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode survey. Metode ini dilakukan dengan survei lapangan. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kondisi eksisting lokasi survey. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan potensi serta permasalahan yang ada di Desa Tulungrejo itu sendiri yang sehingga mendukung proses identifikasi tingkat kemandirian desa tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Survei sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun instansi terkait. Hasil yang diharapkan dari data sekunder ini adalah berupa uraian, data angka, atau peta mengenai keadaan wilayah tersebut. Selain itu survei sekunder juga didapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Survei primer merupakan metode pencarian data dan informasi yang dilakukan secara langsung melalui responden di lapangan. Metode ini dapat berupa observasi dan hasil kuisisioner.

1. Observasi

Merupakan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu guna mendapatkan data obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.

Wawancara yang kami lakukan di Desa Tulungrejo yaitu

mewawancarai para kepala dusun yang ada yang ada di Desa Tulungrejo. Pertanyaan wawancara yang ditanyakan terkait dengan potensi, masalah, aspek fisik, sosial dan ekonomi di dusun tersebut

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi merupakan metode yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Metode Analisa

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Adi, 2004, h. 117). Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, h. 209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Berdasarkan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada dua indeks yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan desa sehingga nantinya desa dapat diklasifikasikan menjadi desa mandiri. Kedua indeks tersebut adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat perkembangan atau kemajuan desa pada suatu waktu. Sumber data yang digunakan dalam menilai adalah data potensi desa yang merupakan survey BPS tiap 4 tahun sekali, dengan dimensi penilaian adalah pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Indeks Membangun Desa (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Sumber data yang digunakan berasal dari pengumpulan data tiap desa dengan dibantu oleh pendamping desa, dengan dimensi penilaian adalah sosial, ekonomi, dan budaya.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaannya, diatur dalam RPJMN 2015–2019, yang menempatkan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk:

1. Memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya
2. Menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang harus dicapai secara bersama-sama oleh para pelaku pembangunan desa
3. Memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa. Mewujudkan amanah

tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Konsep Pembangunan Desa Mandiri Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan Desa Mandiri

Pembangunan desa mandiri memerlukan langkah-langkah strategis, yang terencana, terarah, dan terukur, sehingga memudahkan bagi kita untuk mencermati kemajuan-kemajuannya. Secara umum, strategi dalam mewujudkan desa mandiri adalah diawali dengan terbitnya UU Desa, yang memiliki paradigma baru dengan konsep desa membangun. Konsep desa membangun berarti bahwa kekuatan untuk membangun desa bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh

masyarakat itu sendiri.

Masyarakat desa harus berpartisipasi secara aktif dalam membangun desa itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya-upaya persuasif yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif penting dilakukan, yaitu dengan mendorong masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Pembangunan ini dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Selain melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan desa mandiri juga melibatkan sumberdaya/potensi unggulan dari desa tersebut. Produk unggulan desa adalah komoditas yang ada di desa dan diupayakan secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pemangku kepentingan desa atas produk-produk yang dimiliki atau dikuasai serta telah ditentukan dan disepakati bersama berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, untuk dikembangkan melalui keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya.

Kondisi Sosial dan Kependudukan

Kondisi sosial kependudukan merupakan hal yang paling mendasar dalam pembangunan. Penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan suatu. Kondisi sosial kependudukan Desa Tulungrejo dapat dilihat dari jumlah kependudukan, yaitu jumlah penduduk menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut mata pencaharian, menurut tingkat pendidikan dan sosial budayaitu budaya setempat, Keagamaan, organisasi sosial, kegiatan sosial, dan keamanan.

Jumlah Penduduk Menurut KK

Pada tabel 4.12 dibawah dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Tulungrejo menurut KK berjumlah 2.879 KK dan 2.428 jumlah rumah tangga. Dengan jumlah penduduk menurut KK terbanyak terdapat pada dusun Junggo dengan jumlah KK 962 dan jumlah rumah 840.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut KK

Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah KK	Jumlah Rumah
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Kekep	612	560	1172	355	280
gondang	869	628	1698	508	432
gerdu	532	529	1061	319	211
junggo	1510	1530	3040	962	840
wonorejo	1132	1148	2280	735	665
jumlah	4655	4595	9251	2879	2428

Sumber : RPJMD Desa Tulungrejo

Analisa Lingkup Regional

Analisa KTP2D Kecamatan Bumiaji

Kawasan terpilih pusat pengembangan desa, KTP2D pembangunan kawasan perdesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana permukiman termasuk sentuhan terhadap kawasan rumah tinggal yang mendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa-desa hiterlandnya, tujuan dari KTP2D adalah :

1. Mendapatkan kawasan-kawasan perdesaan sebagai KTP2D dalam suatu kabupaten, lengkap dengan warisan.
2. Mengetahui karakteristik kawasan, secara potensi yang di kembangkan (Agrobisnis, wisata, industri)
3. Mengetahui jenis sumber dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi di kawasan tersebut.
4. Mengetahui mengetahui kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan yang dapat mendorong pengembangan potensi dominan kawasan.

Konsepsi KTP2D

KTP2D merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun sumber daya yang tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada kemandirian masyarakat sesuai dengan azas TRIDAYA yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman.

Penetapan lokasi KTP2D dan perkiraan awal potensi unggulan kawasan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis pada konsep "Good Village". Suatu "Good Village" diindikasikan memiliki kemampuan, terutama untuk

mengembangkan perekonomian lokal berbasis pada potensi unggulannya.

Analisa Desa

Analisa Kependudukan Desa Tulungrejo

Penduduk merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan suatu wilayah, karena itu dalam perencanaan diperlukan analisa sosial dan kependudukan untuk mengetahui pola tingkah laku serta perkembangan dari penduduk itu sendiri. Analisa terkait dengan penduduk ini bertujuan untuk mengetahui potensi pertumbuhan serta perkembangan penduduk sebagai sumber daya dan juga untuk menentukan kebutuhan ruang yang harus tersedia dalam perkembangannya di masa yang akan datang.

Kapasitas daya tampung dapat dihitung berdasarkan proyeksi penduduk yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas serta utilitas. Pada analisa sosial dan kependudukan ini akan dibahas mengenai proyeksi penduduk Desa Baturetno dimana perkiraan jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang, memproyeksikan kepadatan penduduk, dan juga memproyeksikan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan menurut kelompok umur. Adapun pembahasan mengenai analisa sosial dan kependudukan Desa Tulungrejo sebagai berikut.

Indeks Kependudukan Desa Tulungrejo

Kependudukan adalah aspek penting yang berkaitan dengan perencanaan suatu wilayah. Penduduk memiliki andil besar dalam suksesnya sebuah perencanaan, dimana jika disuatu daerah memiliki penduduk yang kurang produktif maka daerah atau wilayah tersebut bisa dikatakan tidak maju. Dalam mencapai daerah yang seimbang dan baik, perlu diusahakan besar dan jumlah penduduk tiap periode sehingga terbentuk keseimbangan persebarannya.

Berikut adalah analisa indeks kependudukan Desa Tulungrejo dalam lingkup Kecamatan Bumiaji :

Tabel 5.1. Indeks Jumlah Penduduk

No	Kelurahan/Desa	Luas(km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Indeks	Klasifikasi
1	Pandanrejo	6,28	5.862	58	RENDAH
2	Bumiaji	8,45	6.450	64	SEDANG
3	Gulukerto	10,07	5.903	58	RENDAH
4	Gunungsari	6,88	6.906	68	SEDANG
5	Punten	2,46	5.330	53	RENDAH
6	Tulungrejo	64,83	9.759	96	TINGGI
7	Sumbergondi	13,79	3.941	39	RENDAH

No	Kelurahan/Desa	Luas(km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Indeks	Klasifikasi
8	Giripurno	9,81	10.148	100	TINGGI
9	Sumber Brantas	5,42	4.758	47	RENDAH

Sumber : Hasil Analisa 2023

Tabel 5.2. Indeks Kepadatan Penduduk

No	Kelurahan/Desa	Luas (Km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Indeks	Klasifikasi
1	Pandanrejo	6,28	5.862	933	43	SEDANG
2	Bumiaji	8,45	6.450	763	35	RENDAH
3	Gulukerto	10,07	5.903	586	27	RENDAH
4	Gunungsari	6,88	6.906	1.004	46	SEDANG
5	Punten	2,46	5.330	2.167	100	TINGGI
6	Tulungrejo	64,83	9.759	151	7	RENDAH
7	Sumbergondi	13,79	3.941	286	13	RENDAH
8	Giripurno	9,81	10.148	1.034	48	SEDANG
9	Sumber Brantas	5,42	4.758	878	41	SEDANG

Sumber : Hasil Analisa 2023

Tabel 5.3. Indeks Penduduk Lahir-Mati

No	Kelurahan/Desa	Penduduk Lahir	Penduduk Mati	Rasio	Indeks	Klasifikasi
1	Pandanrejo	150	65	2	38	RENDAH
2	Bumiaji	256	56	5	75	SEDANG
3	Gulukerto	261	56	5	77	SEDANG
4	Gunungsari	178	41	4	71	SEDANG
5	Punten	213	71	3	49	RENDAH
6	Tulungrejo	275	63	4	72	SEDANG
7	Sumbergondi	246	39	6	104	TINGGI
8	Giripurno	347	57	6	100	TINGGI
9	Sumber Brantas	167	51	3	54	TINGGI

Sumber : Hasil Analisa 2023

Tabel 5.4. Indeks Kependudukan

No	Desa	Indeks				Indeks	Klasifikasi
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Lahir-Mati	Total		
1	Pandanrejo	58	43	38	139	56	RENDAH
2	Bumiaji	64	35	75	174	70	RENDAH
3	Gulukerto	58	27	77	162	65	RENDAH
4	Gunungsari	68	46	71	186	75	SEDANG
5	Punten	53	100	49	202	81	SEDANG
6	Tulungrejo	96	7	72	175	71	RENDAH
7	Sumbergondi	39	13	104	156	63	RENDAH
8	Giripurno	100	48	100	248	100	TINGGI
9	Sumber Brantas	47	41	54	141	57	TINGGI

Sumber : Hasil Analisa 2023

KESIMPULAN

Desa Tulungrejo merupakan salah satu

desa penyangga Kecamatan Bumiaji mengingat letaknya yang strategis dan secara geografis merupakan areal pegunungan dan perbukitan yang subur. Berada dibagian utara wilayah

Kecamatan Bumiaji, Desa Wisata Tulungrejo terletak pada 07°47'141" LS dan 112°32'787" BT. Desa Wisata Tulungrejo merupakan salah satu desa yang terdapat dalam Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan ketinggian tempat sekitar 1000 - 1500 mdpl dan dengan suhu rata-rata 15-25°C. Secara administratif, mempunyai luas 807,019 Ha.

Wilayah Desa Tulungrejo terbagi dalam 18 Rukun Warga dan 81 Rukun Tetangga. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Tulungrejo tidak bisa lepas dari struktur administratif Pemerintahan pada level di atasnya.

Desa Tulungrejo mempunyai kultur sosial yang sangat kental dengan sistem paguyuban dan kegotong-royongan. Tak dapat dipungkiri, adanya kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih dapat berdampak langsung kepada kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah dari perubahan sosial di masyarakat Desa Tulungrejo. Ini memang baik, karena bagaimanapun juga peradaban sosial masyarakat pedesaan juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi pada masa kini

Desa Tulungrejo dikelilingi hutan pegunungan dan perbukitan dengan wilayah pemerintahan yang cukup luas mencakup lima (5) Dusun yaitu Dusun Kekep, Dusun Gondang, Dusun Gerdu, Dusun Junggo serta Dusun Wonorejo. Desa Tulungrejo memiliki prasarana yang lumayan lengkap karena untuk pendidikan dan kesehatan di sana ada, masyarakat Tulungrejo mayoritas petani. Untuk hasil dari KTP2D Kecamatan Bumiaji perdesa nya sudah termasuk ke desa yang sudah berkembang karena hasil nya lebih dari 30 dan adapun desa di Bumiaji juga termasuk pusat pertumbuhan.

Desa Tulungrejo sudah termasuk ke dalam Desa yang mandiri apabila dilihat dari beberapa data yang didapatkan karena desa mandiri itu merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar mencukupi, infrastruktur memadai, aksesibilitas/transportasi tidak sulit, pelayanan umum bagus serta penyelenggaraan pemerintah yang sangat baik di Desa Tulungrejo semua kriteria ini sudah termasuk dan juga dilakukan analisis KTP2D dengan hasil desa Tulungrejo sudah termasuk ke dalam desa yang berkembang dan sebagai pusat pertumbuhan jadi Desa Tulungrejo sudah termasuk Desa yang mandiri. dari pemekaran dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2014).
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air. 3,
1–47.
Arsyad, S. Konservasi Tanah dan Air. Bogor: Institut

Pertanian Bogor(1989).
Chapin, F.S and J. Kaiser. Urban Land Use Planning.
Chicago : University of Chicago Press (1979).
Suharyadi., Hardoyo, S. R. Perubahan Penggunaan
Lahan dan Faktor yang Mempengaruhinya di
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Jurnal UGM.
(2011) 25-40.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2014).
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
(2019). Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemekaran
Kecamatan Pulauaut Utara Dan Pembentukan
Kecamatan Pulau Laut Sigam Dalam Wilayah
Kabupaten Kotabaru.
Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). Statistik Daerah
Kecamatan Pulauaut Utara 2018: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kotabaru.
Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). Statistik Daerah
Kecamatan Pulauaut Utara 2019: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kotabaru.
Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). Statistik Daerah
Kecamatan Pulauaut Utara 2020: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kotabaru.
Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). Statistik Daerah
Kecamatan Pulauaut Sigam 2021: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kotabaru.
Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). Statistik Daerah
Kecamatan Pulauaut Sigam 2022: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kotabaru.
Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). Statistik Daerah
Kabupaten Kotabaru 2023: Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kotabaru.
Lewis,JR.Long Range and Short Range Planning for
Educational Administration. Boston: AlJyn and
Bacon, Inc.(1983).
Rum, I. A., & Heliati, R. MODUL METODE DELPHI.
Universitas Padjajaran, (2018) 15.
Pfeiffer dalam Yousuf. Using experts' opinions through
Delphi technique. Practical Assessment, Research
and Evaluation, (2007) 12(4).
Brodjonegoro, Bambang P.S. AHP. Jakarta: PAU - Studi
Ekonomi Universitas Indonesia. (1992).
Eko Nurmianto, Nurhadi Siswanto dan Sanusi Sapuan.
Perancangan Penilaian Kinerja Karyawan
Berdasarkan Kompetensi Spencer dengan Metode
Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus di Sub
Dinas Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum, Kota
Probolinggo).(2006).
Ilmy, H. F., & Budisusanto, Y. Identifikasi Penentuan
Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh
Perkotaan menggunakan Metode AHP (Analytical
Hierarchy Process). Jurnal Teknik ITS, 6(1), (2017)
19–21.
Arbelia, Paryanta, Penerapan Metode AHP Dan TOPSIS
Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Dalam
Menentukan Kenaikan Jabatan Bagi Karyawan. Vol
20 No 1. STMIK AUB Surakarta. (2014).
Sari & Sensuse. PENERAPAN METODE ANALYTIC
HIERARCHY PROCESS DALAM SISTEM
PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK PEMILIHAN
ASURANSI. BMC Public Health, 5(1), (2012) 1–8.
Saaty, T. L. How to make a decision. International Series
in Operations Research and Management Science,
175, (1990) 1–21.